

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Federasi Rusia terbentuk sebagai hasil dari disintegrasi suatu negara besar yakni Uni Soviet (USSR) yang dibentuk sejak tanggal 30 Desember 1922 dan berakhir pada tanggal 7 Desember 1991. Presiden pertama Federasi Rusia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum pada tahun 1993. Pada masa itu, Rusia berada dalam masa transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara Federasi Rusia untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis. Pemilu diyakini pula sebagai saat yang paling baik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan legitimasi yang kuat, sehingga partai yang ada akan bersaing ketat dengan partai-partai lainnya. Sedangkan bagi rakyat Rusia sendiri pemilu merupakan waktu yang tepat untuk memilih pemimpin yang dirasa dapat mewakili aspirasi mereka.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, struktur pemerintahan Rusia pun berubah, untuk pertama kalinya Rusia mengadakan pemilu yang demokratis pada tahun 1993 dan melahirkan banyak partai – partai baru. Sampai saat ini Republik Federasi Rusia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem multipartai dalam setiap pemilunya. Pemilihan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali untuk

memperebutkan kursi di *Kremlin*.¹ Untuk dapat memenangkan pemilu dan mendominasi *Kremlin*, setiap partai harus mengidentifikasi program partainya (*platform*) dengan tujuan untuk memperoleh suara sebanyak mungkin dari para pemilihnya. Walaupun demikian tidak semua partai akan sukses memasuki *Kremlin*. Hal ini karena Rusia menerapkan sistem *electoral threshold* (batas minimum suara) yaitu setiap partai minimal memperoleh suara 5% dari total suara pemilih. Di Rusia dalam satu periode dilakukan dua kali pemilu yaitu pemilihan umum untuk parlemen (legislatif) dan pemilihan umum untuk presiden. Di dalam konstitusi Rusia disebutkan bahwa semua warga negara mempunyai hak pilih dan hak memilih, warga negara yang berusia minimal 35 tahun dan bertempat tinggal di Federasi Rusia sedikitnya selama 10 (sepuluh) tahun, dapat mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Rusia. Konstitusi Rusia juga mengatur lamanya masa jabatan presiden hanya boleh dijabat sebanyak dua periode, yakni dua kali empat tahun.

Pada pemilu tahun 1999 ada sekitar 26 partai politik yang ikut ambil bagian dalam pesta pemilihan demokrasi.² Partai yang mampu menembus *electoral threshold* dengan memperoleh suara di atas 5% diantaranya adalah Partai Komunis (*The Communist Party of The Russian Federation/ KPRF*), Partai Rusia Bersatu (*United Rusia Party*), Partai Yobloko, Partai Demokratik Liberal (*The Liberal Democratic Party of Russia / LDPR*), Partai Uni Kekuatan Sayap Kanan (*The Union of Right Forces/ SPS*). Partai Rusia Bersatu (*United Rusia Party*) merupakan partai pro – *Kremlin*, terbentuk dari koalisi antara Partai

¹ *Kremlin* adalah julukan untuk parlemen/ pemerintahan Federasi Rusia.

² www.russia.com, diakses tanggal 11 Maret 2005.

Persatuan (*Unity*) dan Partai Fatherland – All Russia pada pemilu 1999, pada saat itu Persatuan memperoleh 23,3% suara dan Partai Fatherland – All Rusia memperoleh 13,3%, mereka menggabungkan total suara pemilih menjadi 36,6%. Selain untuk dapat menambah perolehan kursi di Duma Negara, koalisi partai ini pun bertujuan untuk memperbesar peluang mereka mendukung langkah Vladimir Putin ke puncak kepemimpinan. Penggabungan kedua partai ini secara resmi terbentuk pada tahun 2001 dan selanjutnya terus berada di posisi pro – Putin.

Pada bulan Desember 2003 dan Maret 2004, Rusia kembali menggelar pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang layak bagi kelangsungan hidup demokratis di Rusia. Menurut data Komisi pemilu, jumlah partai atau blok yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tersebut ada 32 partai politik. Berbeda dengan zaman Uni Soviet yang hanya memiliki satu partai politik, yakni Partai Komunis.³ Pemilu kali ini mencatat adanya penurunan dukungan terhadap kubu Komunis, Partai komunis hanya memperoleh 12,61% suara⁴. Pada pemilu sebelumnya Partai Komunis berhasil menarik simpati massa dengan 24,4% suara pemilih. Berbeda dengan Partai Rusia Bersatu yang mendapat peningkatan dalam perolehan suara 37,57% dibandingkan dengan pemilu empat tahun lalu hanya sebesar 36,6% suara pemilih (hasil dari koalisi partai)⁵. Dan untuk pertama kalinya sejak Uni Soviet bubar tahun 1991, partai – partai Liberal (Partai Yabloko dan Partai Uni Kekeuatan Sayap Kanan/SPS)

³ “Pemilu Rusia, Partai Lama Baju Baru”, sabtu, 13 Desember 2003 dalam www.kompas.co.id, diakses 15 April 2004

⁴ “Raih Suara 71,2 persen, Putin Tetap Presiden Rusia”, selasa, 16 Maret 2004 dalam www.republika.co.id, diakses 30 Juli 2004.

⁵ “Dumay Election Final Results” dalam <http://www.Russiavotes.org/>

secara telak tersingkir dari Parlemen karena tidak mampu melewati electoral threshold.

Partai Rusia Bersatu yang lahir dari balik tembok Kremlin akhir tahun 1999 dianggap memiliki keistimewaan. Partai Rusia Bersatu dengan tangan *Kremlin* dapat menguasai Media. Semua mesin politik berada di tangan mereka, sehingga dengan mudah “menundukkan” lawan – lawan politiknya. Bahkan menurut Yevgeny Kiselyov – editor harian Moskovskiye Novosti – saat ini rakyat Rusia tengah melihat kudeta perlahan – lahan yang dilakukan oleh Partai Rusia Bersatu, “Partai yang mereka bangun adalah duplikat dari bekas Partai Komunis – minus Ideologi.”⁶

Ketanggihan Vladimir Putin sebagai calon kuat untuk memimpin Rusia dari kubu Partai Rusia Bersatu tersebut telah terbukti, dengan terpilihnya kembali Putin sebagai pemimpin Rusia untuk kedua kalinya berturut – turut. Pada masa pemerintahannya yang pertama, Vladimir Putin melaksanakan kebijakan ekonomi dan pemulihan stabilitas keamanan di Rusia. Dalam kebijakan ekonominya Putin dengan tegas ingin menerapkan ekonomi pasar bebas di Rusia.

Dalam bidang diplomatik, pemerintahan Vladimir Putin membuat sejarah baru dengan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Polandia. Hal ini ditandai dengan dilakukannya kunjungan kenegaraan Vladimir Putin ke negara bekas blok Komunis tersebut. Kunjungan ini merupakan kontak tingkat tinggi

⁶ “Demokrasi Rusia: Partai Lama Bagi Baru” on cit

pertama kali selama kurang lebih sembilan tahun terakhir. Presiden Rusia terakhir yang bertandang ke Polandia adalah Boris Yeltsin pada tahun 1993.⁷

Rusia juga kembali membuka hubungan diplomatik dengan Inggris, hal ini terjadi setelah 129 tahun kedua negara tersebut tidak melakukan hubungan sama sekali. Sebelumnya hubungan antara Rusia dan Inggris sempat menghangat karena perselisihan mengenai perang di Irak namun tidak menyurutkan langkah kunjungan Putin ke Inggris yang sangat berkaitan erat dengan hubungan dagang di antara kedua negara tersebut.⁸

Kemajuan perekonomian Rusia pun ditandai dengan banyaknya pesanan senjata kepada Asosiasi Industri Militer/ Penerbangan Rusia atau AVPK SUKHOI dari negara – negara di Asia (terutama Cina dan India). Dan penahanan terhadap Mikhail Khodorkovsky (orang terkaya di Rusia) menunjukkan bukti keseriusan Putin dalam memajukan ekonomi Rusia. Putin dalam beberapa tahun ini memenggal jaringan dan kepentingan bisnis dari sekelompok pengusaha yang dia nilai merambisi menjadi pemimpin Rusia.⁹

Namun selama masa pemerintahan pertama Vladimir Putin, banyak janji – janji yang diucapkan selama masa kampanye dulu yang belum terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Seperti menghentikan pemberontakan separatis di Chechnya, yang selalu mendapat kritikan tajam dari dunia Internasional, dan aksi terorisme pun masih terus terjadi di Rusia yang tidak sedikit menelan korban warga sipil dan anak – anak. Krisis ekonomi dan sosial yang berkepanjangan

⁷ "Putin Ke Polandia Untuk Ringankan Beban Masa Lampau", 16 Januari 2002, dalam www.radionederland.com, diakses 21 April 2004.

⁸ "Pertama kali dalam 129 Tahun, Pemimpin Rusia Kunjungi Inggris", <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0306/26/In/393102.htm>, 26 Juni 2003.

⁹ "Calon PM Rusia, Figur Antikorupsi", KOMPAS, 2 Maret 2004.

masih terjadi di beberapa wilayah di Rusia, korupsi masih merajalela, seperempat (20 juta) penduduk Rusia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dari ulasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan – kebijakan Putin pada periode pertama pemerintahannya belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Rusia secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat masih terpuruknya perekonomian nasional Rusia pada saat itu, namun demikian tidak menghambat langkah Putin menduduki jabatan Presiden untuk kedua kalinya, karena pada kenyataannya kebijakan – kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Vladimir Putin sebagian besar menghasilkan pemerintahan Rusia yang adil dan demokratis. Oleh karena itu akhirnya Putin berhasil memenangkan kembali pemilihan presiden Rusia 2004 yaitu dengan perolehan suara mutlak 71,3%¹⁰ dari total suara 109 juta (64,3%).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas: “Faktor – faktor apa yang mendukung keberhasilan Vladimir Putin mempertahankan kekuasaan dalam pemilu 2004 di Rusia?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena yang terjadi di Rusia, terutama pada masa pemerintahan Vladimir Putin yang Pertama (2000 – 2004). Dimana Putin didukung Partai Yedinaya Rasia (Rusia Bersatu) terpilih kembali menjadi

¹⁰ Central Electoral Commission, <http://pr2004.cikrf.ru/etc/svod.xls>, 2 April 2004.

Presiden Rusia melanjutkan perjuangan pemimpin sebelumnya untuk menjalankan proses demokrasi di Rusia setelah kurang lebih 70 tahun berada pada cengkraman kekuasaan kekaisaran dan komunisme. Dan mengemukakan faktor – faktor apa yang membuat Vladimir Putin dapat terpilih kembali sebagai Presiden Rusia

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang Negara Federasi Rusia sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemilu tahun 2004 di Rusia.

Selain itu, penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh penulis di bangku kuliah. Dengan demikian diharapkan penulisan ini dapat mengembangkan potensi diri penulis. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penulisan ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk membahas permasalahan di atas, penulis mencoba menggunakan teori dan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional, yakni konsep strategi, teori komunikasi massa, konsep kekuasaan dan legitimasi, teori sistem politik.

1. Konsep Strategi

Dalam mencapai suatu tujuan, pada bidang apapun selalu ada hal yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu tindakan. Hal ini berkaitan dengan

hal yang dilakukannya. Sama halnya ketika kita hendak melakukan

sesuatu agar tujuan menjadi lebih mudah tercapai, kita perlu memikirkan langkah – langkah yang akan kita ambil demi mengurangi resiko kegagalan sesedikit mungkin. Inilah yang kemudian dikenal sebagai strategi. Strategi (taktik) dikenal pertama kali ketika orang mulai dapat berpikir apakah yang perlu dilakukan ketika akan melakukan perang sehingga kemenangan akan jatuh padanya. Ibarat perang, dalam ilmu politik strategi tidak lagi hanya digunakan dalam medan pertempuran, akan tetapi hampir dilakukan dalam segala aspek. Dalam suatu pertempuran yang tidak menggunakan kontak senjata, pemilu dikenal sebagai ajang bertempur dengan cara kampanye, dalam hal ini strategi digunakan untuk memperebutkan kursi parlemen melalui pemilu yang diselenggarakan sebagai ajang kompetisi antar partai dan calon pemimpin (presiden) dalam memenangi hati rakyat. Dalam menyusun strategi, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan. Oleh Arleigh Burke dirumuskan sebagai berikut:¹¹

“Strategy involves the use and close integration of economic, political, cultural, social, moral, spiritual, and psychological power. Strategy can be formulated only after objectives to be accomplished have been determined.”

Dari pengertian tersebut, pada intinya strategi melibatkan penggunaan berbagai aspek baik ekonomi, politik, budaya, sosial, moral, spiritual sampai kekuatan psikolog. Strategi terbentuk hanya jika tujuan – tujuan yang ingin dicapai telah dirumuskan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, supaya menang dalam pemilu, partai ataupun kandidat calon presiden memiliki derajat tinggi dalam hal kependuan (*cohesin*) atau konsentrasi (*concentration*) organisasinya. Kependuan menentukan daya saing,

yaitu mempergunakan sumber daya dan memanfaatkan lokasi pertarungan (*encounter*) seperti parlemen nasional, pemilu, media massa, dan massa pemilih serta kemampuan memasukkan tujuan – tujuan dan strategi – strategi. Strategi – strategi akan dipusatkan kepada persaingan ketat dengan jalan memperoleh suara yang cukup dalam pemilu untuk memungkinkan mayoritas kursi di parlemen dan kemudian membentuk pemerintahan baru.¹²

2. Teori Komunikasi Massa (Publik)

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang atau lembaga kepada pihak lain, melalui media dengan tujuan supaya pihak penerima pesan (komunikan) berfikir dan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki penyampai pesan (komunikator).

Komunikasi massa adalah komunikasi dengan massa (audiens atau khalayak sasaran). Massa di sini dimaksudkan sebagai para penerima pesan (komunikan) yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu sama lainnya. Pada umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan “feedback” (umpan balik) yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri – ciri massa yaitu: 1. jumlahnya besar ; 2. antara individu, tidak ada hubungan/ organisatoris ; 3. memiliki latar belakang sosial yang berbeda.¹³

Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing – masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu – kepada – banyak. Bentuk yang *pertama* terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara

¹² Robert A. Dahl dalam Miriam Budiarto, “Partisipasi dan Parpol”, Gramedia, Jakarta, hal. 168, 131 – 154.

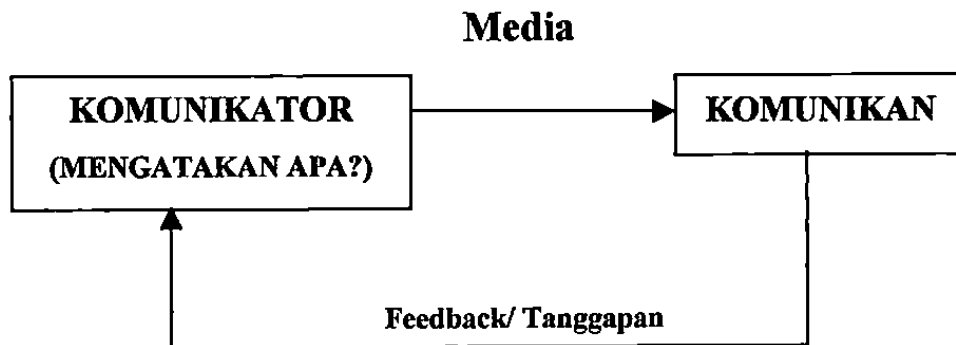
¹³ Wawan Kuswandi, “Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 16

di depan rapat umum atau ketika seorang presiden muncul di depan khalayak besar reporter dalam konferensi pers. Bentuk yang *kedua* terjadi jika ada perantara ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Di sini media, teknologi, sarana, dan alat komunikasi lainnya turut serta. Contoh komunikasi massa berperantara ialah pidato kepresidenan ke seluruh negara (satu – kepada – banyak) melalui televisi.¹⁴

Menurut ilmuwan politik Harold D. Laswell (tahun 1948), cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut: *siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Dengan akibat apa?*¹⁵ Paradigma Harold Laswell tentang proses komunikasi yang berbunyi “*who, says what, to whom, in which channel, and with what effect?*” tersebut secara langsung menggambarkan bahwa proses komunikasi seseorang memerlukan media.¹⁶

Dari definisi tersebut di atas, maka teori dasar Komunikasi menurut Harold D. Laswell dapat di gambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1
Komunikasi Massa Harold D. Laswell



¹⁴ Dan Nimmo, “Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 168

¹⁵ Harold D. Laswell, “The Structure of Communication” dalam ibid, hal.12

Dari bagan tersebut terlihat bahwa komunikator bertindak sebagai subjek yang menggunakan bahasa dan simbol, baik untuk memberikan informasi maupun untuk meyakinkan khalayak/ komunikan (objek) dengan menggunakan bantuan media sebagai alat penyampaiannya, baik berupa audio (radio), visual (surat kabar), maupun audio visual (televisi), sehingga hasil dari komunikasi antara komunikator dan komunikan tersebut akan menghasilkan suatu tanggapan (feedback) baik berupa tanggapan yang positif maupun tanggapan yang negatif.

Dari penjelasan teori di atas, dapat dilihat bahwa Vladimir Putin dalam kampanye politiknya pada pemilihan umum bertindak sebagai seorang komunikator yang menggunakan media, baik berupa media cetak maupun televisi sebagai sarana penyampaian visi, misi dan strateginya kepada masyarakat Rusia yang dalam hal ini berada pada posisi sebagai komunikan atau penerima pesan dan informasi. Sebagai komunikator, dalam kampanye politiknya yang tidak langsung Putin mengisyaratkan untuk perbaikan ekonomi dan keamanan di Rusia, seperti yang diketahui bahwa kondisi perekonomian dan keamanan Rusia masih berada pada posisi yang memprihatinkan sampai saat ini, seperempat penduduk Rusia masih hidup di bawah garis kemiskinan, menghilangkan praktek korupsi masih menjadi tugas berat bagi pemerintahan Putin, dan pemberontakan separatis Chechnya masih terus terjadi, serta aksi terorisme sampai saat ini masih menghantui masyarakat Rusia, yang dalam setiap aksinya tidak sedikit menelan korban jiwa, terutama wanita dan anak – anak. Pada pemerintahannya yang pertama (periode 2000 – 2004) Putin masih belum maksimal dalam perbaikan

Dalam kampanye politiknya pada pemilihan umum presiden maret 2004 yang lalu, secara tegas dan mantap Putin kembali mengisyaratkan untuk perbaikan ekonomi dan keamanan di Rusia, sehingga masyarakat Rusia yang bertindak sebagai komunikan memberikan tanggapan atau feedback berupa dukungan mereka dan memberikan hak suara mereka kepada Putin sehingga Ia terpilih kembali menjadi presiden Rusia dalam pemilihan umum maret 2004 yang lalu. Adanya tanggapan atau feedback dari masyarakat Rusia terhadap Putin tersebut tidak lepas dari besarnya peran media sebagai alat penyampaian pesan atau informasi dari seorang komunikator (Putin) kepada komunikan (rakyat Rusia). Kemampuan suatu media untuk menciptakan suatu persepsi yang baik (positif) maupun yang buruk (negatif) di mata komunikan (rakyat Rusia) terhadap komunikator (Putin).

Adanya pembatasan terhadap liputan kampanye terhadap Partai dan calon presiden lainnya oleh pemerintahan Putin mengakibatkan kurangnya informasi masyarakat terhadap partai – partai dan tokoh – tokoh yang menjadi saingan Putin. Dan media sebagai alat penyampaian strategi Putin menjelang pemilihan umum presiden pada bulan Maret 2004. Hal itu yang membawa putin untuk dapat terpilih kembali menjadi presiden federasi Rusia untuk masa jabatan empat tahun ke depan (2004 – 2008).

3. Konsep Kekuasaan dan Legitimasi

3.1 Konsep Kekuasaan

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan

memberikan sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain

menggunakan sumber – sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya).

Dimensi kekuasaan positif dan negatif merupakan tujuan umum dari pemegang kekuasaan untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan positif ialah penggunaan sumber – sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber – sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

Dimensi kekuasaan dalam bentuk jabatan dan pribadi, biasanya terdapat di dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan terkandung erat dalam jabatan – jabatan, seperti presiden, perdana menteri, menteri – menteri, dan senator. Namun, penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan. Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan.

3.2 Konsep Legitimasi

Legitimasi memiliki kesamaan dengan otoritas atau kewenangan. Legitimasi dapat disebut sebagai kekuasaan yang benar. Yang dapat membedakan

Legitimasi adalah konsep yang berkaitan dengan legitimasi kita akan dibedakan

kepada seluruh dari sistem pemerintahan. Sehingga dapat kita katakan bahwa bila berbicara tentang legitimasi berarti kita berbicara tentang regim.¹⁸

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak? Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.

3.2.1 Obyek Legitimasi

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur – unsur sistem politik yang lain. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur – unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.

Menurut Easton terdapat tiga obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara

terus – menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan.¹⁹

Andrain menyebutkan lima obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima obyek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan.²⁰

3.2.2 Kadar Legitimasi

Sehubungan dengan kadar legitimasi atau jumlah dukungan terhadap kewenangan maka kewenangan dikelompokkan menjadi empat tipe. Keempat kadar legitimasi ini meliputi pralegitimasi, berlegitimasi, tak berlegitimasi, dan pascalegitimasi.²¹

Kewenangan yang *pralegitimasi* adalah apabila pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat. Sebaliknya, banyak pihak dari yang diperintah khususnya berbagai kekuatan yang diperintah belum mengakui hak moral. Pemerintahan yang baru dibentuk acap kali mengalami kewenangan semacam ini.

Kewenangan yang *berlegitimasi* adalah yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah.

¹⁹ David Easton, "A System analysis of Political Life", Chicago: The University of Chicago Press, 1979. dalam Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", PT Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 93 - 94

²⁰ Charles F. Andrain, "Political Life and Social change: An Introduction to Political Science", dalam *ibid.* hal. 93

²¹ David Easton, "A System analysis of Political Life", Chicago: The University of Chicago Press, 1979, hal. 93 - 94

Kewenangan *tak berlegitimasi* adalah hubungan kewenangan tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, sedangkan pihak yang memerintah secara terus – menerus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan.

Kewenangan *pascalegitimasi* adalah dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi baru tersebut.

3.2.3 Cara Mendapatkan Legitimasi

Cara – cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

Pertama, *simbolis*, yakni memanipulasi kecenderungan – kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai – nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol – simbol. Penggunaan simbol – simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi cenderung bersifat ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar.

Kedua, *materiil*, yakni dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha dan modal yang memadai.

Ketiga, *prosedural*, yakni dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan

umum. Penggunaan metode prosedural atau pemilihan umum ini berlangsung mulai dari calon tunggal sampai dengan calon persaingan bebas, dan mulai dari yang bersifat umum, langsung, rahasia, serta jujur dan adil (*fair*) sampai dengan penuh manipulasi dan intimidasi. Bagi sementara sistem politik, penyelenggaraan pemilihan umum dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahnya memiliki legitimasi.

3.2.4 Tipe – tipe Legitimasi

Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu:

Pertama, *legitimasi tradisional*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.

Kedua, *legitimasi ideologi*, yakni masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksud tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan gabungan keduanya.

Ketiga, *legitimasi kualitas pribadi*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharisma maupun penampilan pribadi dan prestasi.

semerang dalam bidang seni budaya tertentu

Keempat, *legitimasi prosedural*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Kelima, *legitimasi instrumental*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Dengan menggunakan konsep Legitimasi dan konsep kekuasaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Vladimir Putin memperoleh kemenangannya kembali pada pemilihan umum di Rusia pada Maret 2004 yang lalu karena Putin dan partai Rusia Bersatu mendapat legitimasi dari rakyat Rusia, yakni terbukti dengan adanya sikap masyarakat yang mengakui dan menerima hak moral pemimpin (Putin) untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat. Dalam obyek legitimasi, Putin tidak mendapat dukungan, hal ini terlihat dari sikap keras kaum separatis di Chechnya yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Federasi Rusia. Dalam kadar legitimasi, pemerintahan berhubungan erat dengan kewenangan yang berlegitimasi, hal ini dapat dilihat dari masyarakat Rusia yang mengakui dan mendukung hak moral penguasa (Putin) untuk memerintah, dan terbentuk dari hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Dalam cara mendapatkan legitimasi, Putin menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil dan kepada masyarakat, seperti menjamin adanya perbaikan perekonomian di Rusia. Kemudian Putin mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dengan cara prosedural yakni ikut dalam

penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara. Tipe legitimasi yang dianut di Rusia yakni, *legitimasi ideologi*: masyarakat memberikan dukungan kepada Vladimir Putin karena Putin dianggap sebagai pelaksana ideologi demokrasi yang saat ini di pegang oleh masyarakat Rusia pada umumnya, *legitimasi kualitas pribadi*: Vladimir Putin memiliki kualitas pribadi berupa kepopuleran dan kharismatik di mata para pendukungnya, *legitimasi prosedural*: Vladimir Putin mendapat kewenangan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam peraturan perundang – undangan, *legitimasi instrumental*: Vladimir Putin menjanjikan kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat Rusia khususnya para pendukung setianya.

Dalam konsep kekuasaan, Putin sebagai pemimpin Rusia memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat. Berdasarkan ciri – ciri kekuasaan, Putin merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan menggunakan sumber – sumber pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi pihak lain, dalam hal ini adalah masyarakat. Kemampuan Putin menguasai media massa sebagai salah satu sumber kekuasaan pada masa kampanye pemilihan umum calon presiden, membuktikan bahwa Putin dan partainya, yakni Rusia Bersatu memiliki kekuasaan untuk mengendalikan media massa untuk dijadikan alat mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas dan secara tidak langsung membatasi kesempatan bagi lawan – lawan politiknya untuk tampil di media. Pada *dimensi kekuasaan potensial dan aktual* : Putin mendapatkan sumber kekuasaan potensial dari jabatannya sebagai presiden Rusia

sehingga ia memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan rakyatnya. Putin memiliki kekuasaan aktual karena ia telah menggunakan sumber jabatannya tersebut secara efektif dalam kegiatan politik. *Dimensi kekuasaan positif dan negatif* : pada dimensi kekuasaan positif Putin menggunakan sumber kekuasaan berupa senjata yang dikemas dalam bentuk perang untuk memerangi kelompok separatis di Chechnya dinilai sangat penting dan harus dihentikan, sedangkan pada dimensi kekuasaan negatif Putin menggunakan kekuasaannya untuk menangkap dan menghentikan kelompok oligarki (sekelompok pengusaha) di Rusia yang dinilai merugikan negara pada umumnya dengan praktek – praktek korupsi dan secara khusus merugikan Putin dan partainya, karena kelompok oligarki tersebut dinilai berambisi ingin menjadi pemimpin Rusia. *Dimensi kekuasaan dalam bentuk jabatan dan pribadi* : Putin sebagai presiden memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur masyarakatnya, hal ini ditunjang pula dari kualitas pribadi kharismatik yang dimiliki Putin, kualitas pribadi sang pemimpin itulah yang membuat Putin dipilih kembali oleh rakyat Rusia untuk masa jabatan empat tahun ke depan. Sosok kharismatik yang dimiliki Putin pun menjadi modal utamanya untuk maju dan terpilih kembali pada pemilihan umum di Rusia dibandingkan dengan lawan politiknya dari partai Komunis, Nikolai Kharitonov. Dari jabatan dan kualitas pribadi itulah maka menimbulkan pengakuan dari masyarakat luas terhadap kekuasaannya tersebut.

4. Teori Sistem Politik

Sebelum memahami proses yang terjadi dalam sebuah sistem politik, perlu

diteliti lebih dahulu definisi dari konsep "sistem". Secara umum sistem

berupa tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi sistem politik. Dalam proses politik ini akan menghasilkan output yang berupa keputusan atau kebijaksanaan. Kemudian terjadi umpan balik atau tanggapan, artinya output akan kembali menimbulkan pengaruh terhadap sistem politik lingkungan tersebut.

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin, masyarakat Rusia yang multi ras – karena Federasi Rusia terbentuk dari banyak negara – khususnya etnis Rusia merasa kurang puas dengan kebijakan yang dibuat, sehingga mengajukan tuntutan – tuntutan yang antara lain agar pemerintah segera memperbaiki kehidupan rakyat di segala bidang, terutama sektor ekonomi, karena setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai negara besar dan adi kuasa pada akhir tahun 1991 telah membawa Rusia ke arah kehidupan yang memprihatinkan karena krisis perekonomian pada pemerintahan Gorbachev dan Yeltsin, sehingga etnis Rusia khususnya dan masyarakat Federasi Rusia pada umumnya, menginginkan adanya kemajuan perekonomian ke arah yang lebih baik, dan tuntutan – tuntutan lainnya seperti di bidang keamanan, masyarakat Rusia menginginkan aksi bom terorisme yang selama ini terjadi di wilayah Rusia dapat segera di selesaikan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang dan aman tanpa ada rasa takut.

Tuntutan – tuntutan dan dukungan yang di dalam sistem politik diolah dan dipikirkan oleh orang – orang yang ada di dalam lembaga pemerintahan, yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan atau keputusan. Namun kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Vladimir Putin yang dikeluarkan dari sistem politik mendukung pemerintah dimana kebijakan yang diputuskan sudah diperhitungkan keuntungannya. Putin mencoba menerapkan sistem pasar

bebas di Rusia, dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional dengan tujuan untuk menambah pemasukan dana ke kas negara, menaikkan pajak bagi perusahaan – perusahaan besar swasta, khususnya perusahaan minyak di Rusia. Kemudian di bidang keamanan, pemerintah Putin tetap berusaha untuk tetap menjaga wilayah kesatuan Federasi Rusia dengan menghentikan upaya disintegrasi dari republik Chechnya yang selama ini meresahkan masyarakat Rusia dengan berbagai aksi teror bom di wilayah – wilayah Rusia oleh kelompok separatis Chechnya.

Output yang menghasilkan kebijakan atau keputusan yang dapat diumpamakan balikan atau tanggapan menghasilkan keputusan yang mampu mendukung pemerintahan Vladimir Putin. Ekonomi Rusia di bawah pemerintahan Putin mengalami peningkatan yang baik dari pemerintahan sebelumnya. Ekonomi yang baik inilah yang dapat mendukung posisi Putin sehingga ia mendapat dukungan perolehan suara yang sangat besar dari masyarakat pada pemilihan umum presiden 14 Maret 2004 dan mengantar Putin kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua masa bakti 4 tahun ke depan.

Suatu negara apabila ekonominya baik itu ditunjang pula oleh politik negaranya, baik dalam arti isu – isu politik yang timbul dapat diredam dengan baik, Vladimir Putin telah membuktikannya, ia telah mampu membuat perekonomian Rusia meningkat dan dapat mengendalikan sistem politik

Vladimir Putin bersama partai Rusia Bersatu dan partai aliansi lainnya dapat bekerjasama dengan baik untuk dapat mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan masyarakat Rusia. Putin dapat membuat suatu kebijakan dari tuntutan yang ada dengan mendapatkan dukungan yang baik dari partai politik dan masyarakat Rusia, walaupun tidak semua tuntutan dapat terpenuhi tapi dalam kenyataannya kepuasan yang dijalankan mampu membuat posisi Putin bertahan dalam menjabat sebagai presiden untuk empat tahun kedua.

E. Hipotesa

Keberhasilan Vladimir Putin menjadi Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Maret 2004 di Rusia disebabkan :

- a. Putin memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menguasai media sebagai alat kampanye dibandingkan dengan kandidat Presiden lainnya sehingga membuat Putin menjadi populer dikalangan masyarakat Rusia.
- b. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan Vladimir Putin pada periode pemerintahannya yang pertama membentuk penilaian positif terhadap kinerja Vladimir Putin bagi perbaikan tatanan pemerintahan di Rusia ke arah yang lebih baik.

F. Jangkauan Penulisan

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan batasan waktu pada masa

Tahun 2000 merupakan saat pertama kali Vladimir Putin memenangkan Pemilihan Umum yang menempatkannya sebagai presiden baru menggantikan Boris Yeltsin. Sedangkan tahun 2004 merupakan tahun kemenangan kembali Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia. Namun berbagai peristiwa yang telah terjadi sebelum tahun 2000 dan sesudahnya yang dinilai masih relevan dengan tema skripsi ini tetap menjadi bahan yang terpenting dalam memberikan gambaran yang obyektif tentang proses terpilihnya kembali Vladimir Putin dalam pemilu 2004.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atas berbagai buku, jurnal – jurnal ilmiah, surat kabar, kliping, internet maupun dokumentasi lainnya yang memuat informasi tentang Pemilihan Umum di Rusia, Pemerintahan Vladimir Putin dan hal – hal yang berkaitan dengan penulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana pembahasan dalam masing – masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub – sub bab.

BAB I : Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok

Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : “Sistem Politik Federasi Rusia”, menjelaskan Gambaran Umum Negara Federasi Rusia: Letak Geografis dan Penduduk, Sejarah Terbentuknya negara Federasi Rusia; Struktur Pemerintahan Federasi Rusia; Sistem Pemilihan Umum di Rusia; Partai – partai Besar di Rusia; Pemilu di Rusia Tahun 2003 dan 2004: Teror Bom Menjelang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilu Parlemen 7 Desember 2003, dan pelaksanaan pemilu Presiden 14 Maret 2004;
- BAB III : “Kepemimpinan Vladimir Putin Tahun 2000 – 2004.” Berisikan Profil Vladimir Putin; Gambaran Pemerintahan Vladimir Putin: keberhasilan yang sudah dicapai, kendala – kendala yang dihadapi; Kemenangan Vladimir Putin dalam Pemilu Maret 2004.
- BAB IV : Menjelaskan mengenai “Popularitas Vladimir Putin dalam Penguasaan Media Massa di Rusia”, yaitu Penguasaan Media sebagai Alat Kampanye: popularitas Vladimir Putin; Adanya Strategi Vladimir Putin Menjelang Pemilu.
- BAB V : “Kebijakan – kebijakan yang Mempengaruhi Terpilihnya Kembali Vladimir Putin Sebagai Presiden pada Pemilu 14 Maret 2004”, yaitu Kebijakan di Bidang ekonomi, Kebijakan di Bidang Keamanan, dan Kebijakan Politik.
- BAB VI : “Kesimpulan.” Pada bagian ini berisikan rangkuman dari bab – bab sebelumnya, juga merupakan penutup dari penulisan skripsi ini.